



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Kinerja Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : DEDY KURNIAWAN, S.IP., M.Si.
NIP : 19860517 200903 1 002
Pangkat/Golongan : Pembina / (IV/a)
Jabatan : Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : H. RADIUS AKIMA, S.Sos., M.T.
NIP : 19710522 199101 1 001
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda / (IV/c)
Jabatan : Inspektur Daerah Kabupaten Bengkulu

Selaku atas Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan yang sesuai dengan Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua,

INSPEKTUR DAERAH

H. RADIUS AKIMA, S.Sos., M.T.
Pembina Utama Muda / (IV/c)
NIP 19710522 199101 1 001

Bengkalis, 17 Januari 2024

Pihak Pertama,

SEKRETARIS

DEDY KURNIAWAN, S.IP., M.Si.
Pembina / (IV/a)
NIP 19860517 200903 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIS INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya implementasi terhadap kinerja Kapabilitas APIP	1. Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi pengawasan	100% Kelengkapan adminisitrasi pengawasan terpenuhi
		2. Jumlah APIP yang dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan substantif APIP	Minimal 1 kali diklat substantif/APIP/tahun
		3. Persentase APIP yang telah memenuhi persyaratan mengikuti diklat penjenjangan	100 % Diklat penjenjangan diikuti bagi APIP yang telah memenuhi persyaratan
		4. Jumlah dokumen program kerja pengawasan tahunan	6 Dokumen prgram kerja dan anggaran pengawasan
		5. Jumlah dokumen laporan kinerja pengawasan	30 Dokumen laporan kinerja dan anggaran berkala dan tahunan
2.	terlaksananya pengawasan terhadap proses pelaksanaan anggaran pada Pemerintah daerah	1. Jumlah pelaksanaan reuiu atas PA dan PBJ	4 Kali reuiu PA dan PBJ
3.	terlaksananya pelayanan sistem informasi hasil pengawasan	1. Jumlah tersedianya data sistem informasi hasil pengawasan secara elektronik	1Aplikasi data sistem informasi hasil pengawasan secara elektronik
		2. Jumlah pelaksanaan monitoring berkala atas penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi peemeriksaan APIP/BPK	4 Kali monitoring

Kegiatan	Anggaran
1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal	: Rp2.186.564.000
2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	: Rp369.978.000
3. Pendampingan dan Asistensi	: Rp1.550.468.000
4. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	: Rp546.257.091
5. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	: Rp9.839.871.834
6. Adminstrasi Barang Milik Daerah	: Rp134.400.000
7. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	: Rp1.032.953.514
8. Administrasi Umum Perangkat Daerah	: Rp1.629.093.569
9. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	: Rp286.000.000
10. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	: Rp422.918.080
11. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	: Rp1.173.542.000

Pihak Kedua,
INSPEKTUR DAERAH



H. RADIUS AKIMA, S.Sos., M.T.
Pembina Utama Muda / (IV/c)
NIP19710522 199101 1 001

Bengkalis, 17 Januari 2024
Pihak Pertama,
SEKRETARIS



DEDY KURNIAWAN, S.IP., M.Si.
Pembina / (IV/a)
NIP 19860517 200903 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Kinerja Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : HAMDAN, S.Si., M.Si.
NIP : 19690617 199803 1 004
Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I / (IV/b)
Jabatan : Inspektur Pembantu I

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : H. RADIUS AKIMA, S.Sos., M.T.
NIP : 19710522 199101 1 001
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda / (IV/c)
Jabatan : Inspektur Daerah Kabupaten Bengkalis

Selaku atas Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan yang sesuai dengan Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua,
INSPEKTUR DAERAH

H. RADIUS AKIMA, S.Sos., M.T.
Pembina Utama Muda / (IV/c)
NIP 19710522 199101 1 001

Bengkalis, 17 Januari 2024
Pihak Pertama,
INSPEKTUR PEMBANTU I

HAMDAN, S.Si., M.Si.
Pembina Tk. I / (IV/b)
NIP 19690617 199803 1 004

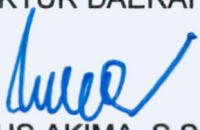
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTUR PEMBANTU I INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya evaluasi berkala pencapaian MCP Korupsi Daerah terhadap evaluasi pencapaian Korsupgah Pemerintah	Persentase capaian atas target rencana aksi secara berkala terhadap 8 area intervensi MCP Korsupgah Korupsi	100% Capaian target pemenuhan rencana aksi MCP secara berkala yang ditetapkan terpenuhi
2.	Terlaksananya pengawasan terhadap responsif gender (PPRG) pada Pemerintah Daerah	1. Jumlah pelaksanaan reviu atas perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) 2. Persentase bidang/sub bidang yang bersumber dari dak dilakukan reviu sesuai tahapnya	1 Kali Kegiatan 100% Bidang/sub bidang sesuai tahap
3.	Terlaksananya pengawasan terhadap Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah	Jumlah unit kerja difasilitasi pembangunan kawasan zona integritas menuju WBK WBBM pada masing masing wilayah irban	1 Unit kerja yang mengimplementasikan pembangunan kawasan zona integritas menuju WBK WBBM
4.	Terlaksananya pengawasan pada pengelolaan keuangan desa	Jumlah desa dilakukan audit berbasis Siswaskeudes	8 Desa
5.	Terlaksananya pengawasan kinerja terhadap program strategis Pemerintah Daerah	Jumlah program strategis Pemda yang berisiko tinggi yang dilaksanakan Perangkat Daerah dilakukan audit kinerja	1 Program strategis pemda yang dilakukan Perangkat Daerah
6.	Terlaksananya pengawasan kepatuhan terhadap program strategis Pemerintah Daerah	Jumlah program strategis Pemda yang berisiko tinggi yang dilaksanakan Perangkat Daerah dilakukan audit kepatuhan	1 Program strategis Pemda yang dilakukan Perangkat Daerah
7.	Terlaksananya pengawasan terhadap manajemen sdm asn pada Pemerintah Daerah	Jumlah pelaksanaan reviu atas tata kelola manajemen ASN	1 Kali pelaksanaan reviu atas tata kelola manajemen ASN

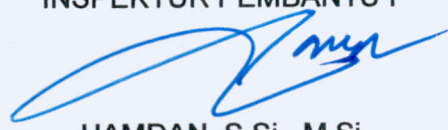
(1)	(2)	(3)	(4)
8.	Terlaksananya pengawasan terhadap proses penganggaran tahunan Pemerintah Daerah	1. Jumlah pelaksanaan reviu atas KUA-PPAS Perubahan tahun 2024 2. Jumlah pelaksanaan reviu atas KUA - PPAS tahun 2025	1 kali pelaksanaan reviu KUA-PPAS Perubahan 2024 1 kali pelaksanaan reviu KUA -PPAS 2025
9.	Terlaksananya pendampingan terhadap pelaksanaan proyek strategis Pemerintah Daerah	1. Jumlah proyek strategis Pemerintah Daerah yang dilaksanakan probity audit 2. Jumlah proyek strategis pemerintah daerah yang dilaksanakan reviu atas HPS	1 Proyek staregis Pemda 2 Proyek strategis Pemda
10.	Terlaksananya pengawasan terhadap proses pelaksanaan anggaran pada Pemerintah Daerah	1. Jumlah pelaksanaan reviu atas dokumen SSH/ASB/HSPK Pemerintah Daerah 2. Jumlah pelaksanaan reviu atas tata kelola BMD Pemerintah Daerah	3 Kali riviui pada setiap dokumen SSH/ASB/HSPK 1 Kali reviu atas tata kelola BMD
11.	Terlaksananya program pengendalian korupsi Pemerintah Daerah	1. Persentase penyelenggara negara yang wajib LHKPN melaporkan harta dan kekayaan tepat waktu 2. Persentase pengisian survei oleh stakeholder penilaian integritas terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	100% Wajib LHKPN tepat waktu 100% Pengisian survei SPI oleh responden yang ditetapkan

Kegiatan	Anggaran
1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal	: Rp2.186.564.000
2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	: Rp369.978.000
3. Pendampingan dan Asistensi	: Rp1.550.468.000

Pihak Kedua,
INSPEKTUR DAERAH


H. RADIUS AKIMA, S.Sos., M.T.
Pembina Utama Muda / (IV/c)
NIP 19710522 199101 1 001

Bengkalis, 17 Januari 2024
Pihak Pertama,
INSPEKTUR PEMBANTU I


HAMDAN, S.Si., M.Si.
Pembina Tk. I / (IV/b)
NIP 19690617 199803 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Kinerja Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : dr. H. EDI SETIAWAN, M.M.
NIP : 19701224 199612 1 001
Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I / (IV/b)
Jabatan : Inspektur Pembantu II

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : H. RADIUS AKIMA, S.Sos., M.T.
NIP : 19710522 199101 1 001
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda / (IV/c)
Jabatan : Inspektur Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan

Selaku atas Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan yang sesuai dengan Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua,
INSPEKTUR DAERAH

H. RADIUS AKIMA, S.Sos., M.T.
Pembina Utama Muda / (IV/c)
NIP 19710522 199101 1 001

Bengkalis, 17 Januari 2024
Pihak Pertama,

INSPEKTUR PEMBANTU II

dr. H. EDI SETIAWAN, M.M.
Pembina Tk. I / (IV/b)
NIP 19701224 199612 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTUR PEMBANTU II INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya pengawasan terhadap proses pelaksanaan anggaran pada Pemerintah Daerah	Persentase bidang/sub bidang yang bersumber dari dak dilakukan reviu sesuai tahapnya	100% Bidang/sub bidang sesuai tahap
2.	Terlaksananya pengawasan terhadap Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah	Jumlah unit kerja difasilitasi pembangunan kawasan Zona Integritas menuju WBK WBBM pada masing masing Wilayah Irban	1 Unit kerja yang mengimplementasikan pembangunan kawasan zona integritas menuju WBK WBBM
3.	Terlaksananya pengawasan pada pengelolaan keuangan Desa	Jumlah desa dilakukan audit berbasis Siswaskeudes	8 Desa
4.	Terlaksananya pengawasan kinerja terhadap program strategis Pemerintah Daerah	Jumlah program strategis pemda yang berisiko tinggi yang dilaksanakan Perangkat Daerah dilakukan audit kinerja	1 Program strategis pemda yang dilakukan Perangkat Daerah
5.	Terlaksananya pengawasan kepatuhan terhadap program strategis Pemerintah Daerah	Jumlah program strategis pemda yang berisiko tinggi yang dilaksanakan Perangkat Daerah dilakukan audit kepatuhan	1 Program strategis Pemda yang dilakukan Perangkat Daerah
6.	Terlaksananya Pengawasan Terhadap Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	1. Jumlah pelaksanaan reviu atas Stok Opname	1 Kali reviu Stok Opname Kas
		2. Jumlah Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebelum dilakukan Audit oleh BPK RI	1 Kali reviu laporan keuangan
7.	Terlaksananya pengawasan terhadap proses penganggaran tahunan Pemerintah Daerah	1. Jumlah pelaksanaan reviu atas RKA Perubahan Tahun 2024	1 Kali pelaksanaan reviu RKA Perubahan Tahun 2024
		2. Jumlah pelaksanaan reviu atas RKA Tahun 2025	1 Kali pelaksanaan reviu RKA 2025

(1)	(2)	(3)	(4)
8.	Terlaksananya pendampingan terhadap pelaksanaan proyek strategis Pemerintah Daerah	1. Jumlah proyek strategis Pemerintah Daerah yang dilaksanakan probity audit 2. Jumlah proyek strategis Pemerintah Daerah yang dilaksanakan reuiu atas HPS	1 Proyek staregis Pemda 2 Proyek strategis Pemda
9.	Terlaksananya pengawasan terhadap proses pelaksanaan anggaran pada Pemerintah Daerah	1. Jumlah pelaksanaan reuiu atas kinerja UKPBJ 2. Jumlah pelaksanaan audit/evaluasi/reuiu atas optimaliasi pajak Daerah	1 Kali reuiu atas kinerja UKPBJ 1 Kali audit/evaluasi/reuiu optimaliasi pajak Daerah

Kegiatan	Anggaran
1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal	: Rp2.186.564.000
2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	: Rp369.978.000
3. Pendampingan dan Asistensi	: Rp1.550.468.000

Pihak Kedua,
INSEPKTUR DAERAH



H. RADIUS AKIMA, S.Sos., M.T.
Pembina Utama Muda / (IV/c)
NIP 19710522 199101 1 001

Bengkalis, 17 Januari 2024
Pihak Pertama,
INSPEKTUR PEMBANTU II



dr. H. EDI SETIAWAN, M.M.
Pembina Tk. I / (IV/b)
NIP 19701224 199612 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Kinerja Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MAULA AFRIZAL, S.E., M.Ec.Dev
NIP : 19780222 200501 1 004
Pangkat/Golongan : Pembina / (IV/a)
Jabatan : Inspektur Pembantu III

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : H. RADIUS AKIMA, S.Sos., M.T
NIP : 19710522 199101 1 001
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda / (IV/c)
Jabatan : Inspektur Daerah Kabupaten Bengkulu

Selaku atas Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan yang sesuai dengan Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua,
INSPEKTUR DAERAH

H. RADIUS AKIMA, S.Sos., M.T.
Pembina Utama Muda / (IV/c)
NIP 19710522 199101 1 001

Bengkalis, 17 Januari 2024
Pihak Pertama,
INSPEKTUR PEMBANTU III

MAULA AFRIZAL, S.E., M.Ec.Dev.
Pembina / (IV/a)
NIP 19780222 200501 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTUR PEMBANTU III INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

No	Sasaran	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya implementasi terhadap kinerja kapabilitas APIP	1. Jumlah pelaksanaan monitoring/evaluasi secara berkala capaian profil kapabilitas APIP 2. Jumlah pelaksanaan penilaian mandiri kapabilitas APIP	4 Kali monitoring/evaluasi berkala 1 Kali penilaian mandiri
2.	Terlaksananya pengawasan terhadap proses pelaksanaan anggaran pada Pemerintah Daerah	Persentase bidang/sub bidang yang bersumber dari DAK dilakukan reuiu sesuai tahapnya	100% Bidang/sub bidang sesuai tahap
3.	Terlaksananya pengawasan terhadap implementasi akuntabilitas kinerja pada Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan reuiu atas LPPD/Laporan kinerja	1 Dokumen laporan pelaksanaan reuiu atas LPPD / Laporan kinerja
4.	Terlaksananya pengawasan terhadap Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah	Jumlah unit kerja difasilitasi pembangunan kawasan zona integritas menuju wbb wbbm pada masing masing wilayah Irban	1 Unit kerja yang mengimplementasikan pembangunan kawasan Zona Integritas menuju WBK WBBM
5.	Terlaksananya pengawasan pada pengelolaan keuangan Desa	Jumlah desa dilakukan audit berbasis Siswaskeudes	8 Desa
6.	Terlaksananya pengawasan kinerja terhadap program strategis Pemerintah Daerah	Jumlah program strategis pemda yang berisiko tinggi yang dilaksanakan perangkat daerah dilakukan audit kinerja	1 Program strategis pemda yang dilakukan Perangkat Daerah
7.	Terlaksananya pengawasan kepatuhan terhadap program strategis Pemerintah Daerah	Jumlah program strategis Pemda yang berisiko tinggi yang dilaksanakan Perangkat Daerah dilakukan audit kepatuhan	1 Program strategis pemda yang dilakukan Perangkat Daerah

(1)	(2)	(3)	(4)
8.	Terlaksananya pengawasan terhadap proses perencanaan tahunan Pemerintah Daerah	1. Jumlah pelaksanaan reviu atas RKPD Tahun 2025	1 kali pelaksanaan reviu RKPD Tahun 2025
		2. Jumlah pelaksanaan reviu atas RKPD Perubahan Tahun 2024	1 kali pelaksanaan reviu RKPD Perubahan Tahun 2024
9.	Terlaksananya pendampingan terhadap pelaksanaan proyek strategis Pemerintah Daerah	1. Jumlah proyek strategis Pemerintah Daerah yang dilaksanakan probity audit	1 Proyek staregis Pemda
		2. Jumlah proyek strategis Pemerintah Daerah yang dilaksanakan reviu atas HPS	2 Proyek strategis Pemda
10.	Terlaksananya pengawasan terhadap proses pelaksanaan anggaran pada Pemerintah Daerah	Jumlah pelaksanaan reviu atas tata kelola perizinan/non perizinan	1 Kali reviu atas tata kelola perizinan/non perizinan

Kegiatan	Anggaran
1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal	: Rp2.186.564.000
2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	: Rp369.978.000
3. Pendampingan dan Asistensi	: Rp1.550.468.000

Pihak Kedua,
INSEPKTUR DAERAH



H. RADIUS AKIMA, S.Sos., M.T.
Pembina Utama Muda / (IV/c)
NIP 19710522 199101 1 001

Bengkalis, 17 Januari 2024
Pihak Pertama,
INSPEKTUR PEMBANTU III



MAULA AFRIZAL, S.E., M.Ec.Dev.
Pembina / (IV/a)
NIP 19780222 200501 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Kinerja Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : FEBRIMAN DURYA, S.E., M.M.
NIP : 19730207 200501 1 005
Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I / (IV/b)
Jabatan : Inspektur Pembantu IV

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

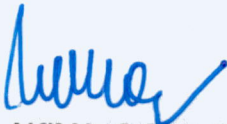
Nama : H. RADIUS AKIMA, S.Sos., M.T.
NIP : 19710522 199101 1 001
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda / (IV/c)
Jabatan : Inspektur Daerah Kabupaten Bengkalis

Selaku atas Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan yang sesuai dengan Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.


Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua,
INSPEKTUR DAERAH


H. RADIUS AKIMA, S.Sos., M.T.
Pembina Utama Muda / (IV/c)
NIP 19710522 199101 1 001

Bengkalis, 17 Januari 2024
Pihak Pertama,

INSPEKTUR PEMBANTU IV


FEBRIMAN DURYA, S.E., M.M.
Pembina Tk. I / (IV/b)
NIP 19730207 200501 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTUR PEMBANTU IV INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya pengawasan terhadap implementasi akuntabilitas kinerja pada Perangkat Daerah	1. Jumlah Perangkat Daerah dilakukan reviu atas laporan kinerja 2. Jumlah perangkat daerah dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah 3. Jumlah Perangkat Daerah dilakukan monitoring berkala atas rekomendasi evaluasi akuntabilitas kinerja	47 Perangkat Daerah 47 Perangkat Daerah 2 Kali monitoring
2.	Terlaksananya pengawasan terhadap Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah	1. Jumlah pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi internal 2. Jumlah unit kerja difasilitasi pembangunan kawasan Zona Integritas menuju WBK WBBM pada masing masing wilayah Irban	1 Kali evaluasi 1 Unit kerja yang mengimplementasikan pembangunan kawasan Zona Integritas menuju WBK WBBM
3.	Terlaksananya pengawasan pada pengelolaan keuangan Desa	Jumlah desa dilakukan audit berbasis Siswaskeudes	8 Desa
4.	Terlaksananya pengawasan kinerja terhadap program strategis Pemerintah Daerah	Jumlah program strategis pemda yang berisiko tinggi yang dilaksanakan perangkat daerah dilakukan audit kinerja	1 Program strategis pemda yang dilakukan Perangkat Daerah
5.	Terlaksananya pengawasan kepatuhan terhadap program strategis Pemerintah Daerah	Jumlah program strategis pemda yang berisiko tinggi yang dilaksanakan perangkat daerah dilakukan audit kepatuhan	1 Program strategis Pemda yang dilakukan Perangkat Daerah
6.	Terlaksananya pendampingan terhadap pelaksanaan proyek strategis pemerintah daerah	1. Jumlah proyek strategis pemerintah daerah yang dilaksanakan probity audit 2. Jumlah proyek strategis pemerintah daerah yang dilaksanakan reviu atas HPS	1 Proyek staregis Pemda 2 Proyek strategis Pemda 3

(1)	(2)	(3)	(4)
7.	Terlaksananya pengawasan SPIP pada Pemerintah Daerah	Jumlah pelaksanaan asistensi/fasilitasi SPIP pada Perangkat Daerah	2 Kali pada 21 Perangkat Daerah
8.	Terlaksananya pengawasan terhadap implementasi manajemen risiko pada Pemerintah Daerah	1. Jumlah pelaksanaan penilaian mandiri/penjaminan kualitas SPIP	1 Kali pelaksanaan penilaian mandiri dan 1 kali penjaminan kualitas SPIP
		2. Jumlah pelaksanaan penilaian mandiri/penjaminan kualitas atas manajemen risiko Pemerintah Daerah	1 Kali pelaksanaan penilaian mandiri dan 1 kali penjaminan kualitas manajemen risiko
		3. Jumlah pelaksanaan asistensi/fasilitasi atas penilaian risiko Pemda/Perangkat Daerah	1 Kebijakan daerah tentang penilaian risiko pemda dan 21 keputusan kepala perangkat daerah peta risiko Perangkat Daerah
		4. Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan evaluasi atas penilaian risiko	Minimal 1 kali 21 Perangkat Daerah dievaluasi penilaian risiko dalam 1 tahun
		5. Jumlah perangkat daerah yang dilakukan asistensi dalam melaporkan kejadian risiko	Minimal 1 kali 21 laporan kejadian risiko Perangkat Daerah

Kegiatan	Anggaran
1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Rp2.186.564.000
2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Rp369.978.000
3. Pendampingan dan Asistensi	Rp1.550.468.000

Pihak Kedua,
INSEPKTUR DAERAH



H. RADIUS AKIMA, S.Sos., M.T.
Pembina Utama Muda / (IV/c)
NIP 19710522 199101 1 001

Bengkalis, 17 Januari 2024
Pihak Pertama,
INSPEKTUR PEMBANTU IV



FEBRIMAN DURYA, S.E., M.M.
Pembina Tk. I / (IV/b)
NIP 19730207 200501 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Kinerja Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SUHERMANTO, S.E.
NIP : 19791209 200604 1 004
Pangkat/Golongan : Pembina / (IV/a)
Jabatan : Inspektur Pembantu V

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : H. RADIUS AKIMA, S.Sos., M.T.
NIP : 19710522 199101 1 001
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda / (IV/c)
Jabatan : Inspektur Daerah Kabupaten Bengkulu

Selaku atas Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan yang sesuai dengan Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua,
INSPEKTUR DAERAH

H. RADIUS AKIMA, S.Sos., M.T.
Pembina Utama Muda / (IV/c)
NIP 19710522 199101 1 001

Bengkalis, 17 Januari 2024

Pihak Pertama,
INSPEKTUR PEMBANTU V

SUHERMANTO, S.E.
Pembina / (IV/a)
NIP 19791209 200604 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTUR PEMBANTU V INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat	1. Peresentase rekomendasi atas pelaksanaan audit investigatif yang ditindaklanjuti 2. Persentase rekomendasi atas pelaksanaan audit PKN yang ditindaklanjuti	100% Rekomendasi ditindaklanjuti atas pelaksanaan audit investigatif 100% Rekomendasi ditindaklanjuti atas pelaksanaan audit PKN
2.	Terlaksananya pendampingan terhadap pelaksanaan proyek strategis Pemerintah Daerah	1. Jumlah proyek strategis Pemerintah Daerah yang dilaksanakan probity audit 2. Jumlah proyek strategis pemerintah daerah yang dilaksanakan reviu atas HPS	1 Proyek staregis Pemda 2 Proyek strategis Pemda
3.	Terlaksananya program pengendalian korupsi Pemerintah Daerah	1. Jumlah kebijakan daerah tentang Whistelblowing System (WBS) 2. Persentase tersedianya data sistem informasi hasil pengawasan WBS secara elektronik 3. Persentase pengisian survei oleh stakeholder pada pemenuhan IEPK 4. Jumlah penyuluhan/sosialisasi anti korupsi terkait pemenuhan MCP KPK dan Indeks Efektifitas Pengelolaan Korupsi 5. Persentase pemenuhan indikator pada elemen IEPK	1 Dokumen Peraturan Bupati tentang Whistelblowing System (WBS) 100% Data pengawasan WBS terinformasikan secara elektronik 100% Pengisian survei IEPK oleh responden yang ditetapkan 1 Dokumen laporan administrasi penyuluhan/sosialisasi anti korupsi seperti dipersyaratkan pada pemeuhan MCP KPK dan Indeks Efektifitas Pengelolaan Korupsi terinformasikan Level 3 pemenuhan IEPK

(1)	(2)	(3)	(4)
		6. Jumlah pelaksanaan asistensi/fasilitasi atas penilaian risiko korupsi Pemda/Perangkat Daerah	1 Kebijakan Daerah tentang penilaian risiko korupsi pemda dan 21 keputusan kepala Perangkat Daerah peta risiko korupsi Perangkat Daerah
		7. Jumlah pelaksanaan atas penilaian mandiri/penjaminan kualitas IEPK	1 Kali pelaksanaan penilaian mandiri dan 1 kali penjaminan kualitas IEPK

Kegiatan	Anggaran
1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal	: Rp2.186.564.000
2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	: Rp369.978.000
3. Pendampingan dan Asistensi	: Rp1.550.468.000

Pihak Kedua,
INSEPKTUR DAERAH



H. RADIUS AKIMA, S.Sos., M.T.
Pembina Utama Muda / (IV/c)
NIP 19710522 199101 1 001

Bengkalis, 17 Januari 2024
Pihak Pertama,

INSPEKTUR PEMBANTU V



SUHERMANTO, S.E.
Pembina / (IV/a)
NIP 19791209 200604 1 004